

DINAMIKA ELITE DALAM POLITIK SURABAYA

Studi konflik pemakzulan walikota Surabaya

R. Bintang Permana Putra

NPM. 070710149

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkap dinamika elite dalam suatu masyarakat berjalan dan kemudian terjadi sebuah wacana pemakzulan seorang elite yang ada dalam daerah tersebut. Dalam kasus wacana pemakzulan walikota Surabaya, Tri Risma, dinamika elite tarik menarik kepentingan guna melengserkan walikota perempuan pertama di Surabaya ini. Hadirnya kepentingan elite tak hanya berasal dari kalangan politisi semata, namun juga atas desakan dari elite pengusaha yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Tri Risma mengingat tak sedikit politisi yang menggugat Tri Risma, yakni sebagian besar kalangan DPRD Kota Surabaya merupakan elite pengusaha di sisi lain serta terdapat pula politisi yang memiliki hubungan erat dengan elite pengusaha. Dalam perjalanannya wacana pemakzulan Tri Risma ini memiliki dinamika yang sangat menarik setelah di kaji lebih dalam. Dinamika pemakzulan yang bermula dari salah satu kebijakan risma yang dirasa kurang menguntungkan bagi sebagian pihak ini, yakni kebijakan pajak reklame sebagai salah satu contoh, menjadi awal dari kebijakan para politisi DPRD Surabaya yang kemudian bertransformasi menjadi Surat Keputusan DPRD Kota Surabaya No. 02 tahun 2011 tentang pemberhentian Walikota Surabaya yang kemudian dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini mencoba menggambarkan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, peneliti mencoba memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai bagaimana dinamika kepentingan elite politik, baik itu dalam hal kepentingan-kepentingan yang ada, proses muncul dan berjalannya negosiasi politik antar elite, serta aktor-aktor yang berperan dalam wacana pemakzulan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Kata Kunci : Elite Politik, Pemakzulan Kepala Daerah (walikota), Konflik, Kepentingan

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Dinamika elite politik selalu menjadi hal menarik untuk dibahas, karena sifatnya yang selalu berubah sesuai kondisi zaman dan tidak terikat pada ruang dan waktu, dimana kemudian persoalan elite ini akan selalu berkuat pada kepentingan dan kekuasaan (semata). Dinamika, dalam konteks politik adalah gerak atau kekuatan politik yang dimiliki dan dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan elite politik sendiri dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang secara kuantitas kecil, namun mempunyai akses dan power, yang mana dalam hal ini, biasanya menempati lapisan atas dalam lapisan masyarakat.

Dalam studi kasus penelitian ini, saya mencoba mengangkat suatu tema dinamika elite yang cukup sering kita dengar pada beberapa bulan lalu dan terjadi pada tingkatan nasional ataupun lokal suatu daerah. Tema tersebut yakni bagaimana dinamika elite dalam suatu masyarakat berjalan dan kemudian terjadi sebuah wacana akan sebuah pemakzulan seorang elite yang ada dalam daerah tersebut.

Perjalanan wacana pemakzulan disini menjadi suatu hal yang menarik mengingat segala proses yang terjadi di dalamnya kerap kali melibatkan kepentingan - kepentingan elite politik semata tanpa adanya kepentingan politik yang berpijak pada kebutuhan akan kondisi masyarakat pada waktu itu. Memang, masyarakat akan lebih banyak diam, atau mungkin tidak mampu berbuat banyak melihat manuver - manuver politik yang dilakukan oleh elite sering dilakukan diluar nalar bagaimana seharusnya tata pemerintahan dan kebijakan itu diambil.

Jika kita meminjam apa yang dikemukakan oleh Keller¹ mengenai kedudukan elite yang berada pada posisi sosial yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya, terdapat suatu logika sederhana yang bisa kita tarik mengapa kemudian mereka yang menamakan dirinya elite tersebut, merasa berhak untuk melakukan sesuatu meskipun hal tersebut bukanlah hal yang sepenuhnya merepresentasikan konstituen mereka. Bagi elite, kelebihan yang mereka miliki, sebagaimana dikemukakan oleh Keller, membuat elite menjadi magnet kekuasaan yang berpotensi untuk mampu melakukan segala hal. Dari sini, maka penulis sendiri lebih senang jika

¹ Suzzane Keller sendiri banyak menjadi rujukan teori oleh peneliti terkait penjelasannya tentang teori elite. Selain karena Keller termasuk sebagai pengamat elite yang kontemporer, penjelasannya tentang elite dianggap lebih mampu untuk mendeskripsikan kondisi elite saat ini.

kemudian mendefinisikan kelebihan tersebut menjadi kepemilikan akan sumber-sumber kekuasaan, yang mana sumber-sumber tersebut dapat berbentuk banyak hal.

Dalam konteks perpolitikan yang ada di dunia, elite yang kini banyak memilih untuk terjun kedalam ranah politik, seyogyanya bukanlah mereka yang paham akan ilmu-ilmu politik sebagaimana seharusnya dimiliki oleh seorang politisi guna mengelola tata Negara. Bahkan, politik sendiri menjadi magnet yang memikat seluruh kalangan, meskipun mereka sebelumnya bukanlah termasuk sebagai kalangan elite, untuk “mengadu nasib” dalam dunia yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai ranah yang menguasai ranah lainnya.

Di Indonesia, ketertarikan akan dunia politik banyak menginfeksi segala lapisan masyarakat, baik mereka yang sebelumnya bukan berasal dari kalangan elite serta mereka yang memang sebelumnya merupakan kalangan elite, entah mereka yang memang berasal dari elite politik sendiri maupun mereka yang berasal dari elite ekonomi / pengusaha, birokrat, teknokrat, sosial bahkan elite agama.

Meskipun dalam dunia politik Indonesia dan tentu saja di seluruh dunia yang lainnya memiliki partai politik sebagai kendaraan politik yang menghimpun aspirasi serta secara tidak langsung menentukan sebuah kebijakan yang diambil oleh sebuah pemerintahan suatu Negara, namun peran elite yang sangat dominan dalam hal penentuan kebijakan menjadi suatu hal yang akan selalu kita temukan dalam segala kasus perpolitikan yang ada di dunia. Bahkan, peran yang lebih bersifat individual inilah yang lebih banyak kita temukan menjadi penentu utama bagaimana sebuah kebijakan kemudian diambil dan berjalan. Tak terkecuali kebijakan sebuah partai politik.

Contoh yang mungkin dapat menunjukkan bagaimana kekuatan elite menjadi perhatian yang menarik untuk dibahas yakni, bagaimana politik patronase banyak dilakukan oleh partai-partai politik besar yang ada di Indonesia. Partai politik ini kemudian “tidak berani” keluar dari karakter atau mungkin image seseorang elite yang dinilai memiliki kekuatan besar bukan hanya sekedar dalam hal financial, namun juga bisa berkaitan karena elite tersebut memiliki pengaruh serta kharisma yang kuat sehingga mampu mendirikan sebuah partai politik, dan tentu saja mampu menghimpun ribuan bahkan jutaan massa yang setia pada tokoh elite tersebut. Sebut saja, PDI-P yang kemudian tidak mampu keluar dari image seorang Soekarno, PKB yang banyak memperoleh suara karena ketokohan Gus Dur, maupun Demokrat yang setia dalam “menjual” figure seorang SBY.

Politik individu inilah yang kemudian penulis asumsikan bahwa peran elite dalam hal pengambilan keputusan maupun kebijakan menjadi salah satu faktor paling penting bagaimana hal tersebut akan diambil dan berjalan. Dari sini, budaya seperti inilah yang kemudian merembet pada kalangan elite yang berada pada kasta terbawah. Mungkin bukan karena ketokohan elite tersebut yang menjadi penentu kenapa kemudian politik elite tersebut berjalan, namun lebih dikarenakan keyakinan elite daerah (kita sebut demikian guna memudahkan dalam hal penyebutan elite yang berada pada posisi lokal) bahwa mereka telah melakukan banyak hal, termasuk pengorbanan finansial untuk mencapai posisi yang menasbihkan dirinya sebagai pemegang kekuasaan di daerah.

Pembahasan diatas telah menunjukkan kepada kita bahwa kemudian elite politik menjadi bidak penentu dalam hal bagaimana kemudian sebuah partai politik memainkan peran mereka dalam percaturan politik.

Dalam kasus wacana pemakzulan walikota Surabaya, Tri Risma, yang disini kemudian akan banyak dibahas dalam skripsi ini, dinamika elite akan tarik menarik kepentingan guna melengserkan walikota perempuan pertama di Surabaya ini memiliki cerita menarik tersendiri mengingat wacana pemakzulan tersebut di gelontorkan ketika Tri Risma menjabat tak lebih dari sekitar 2 bulan kepemimpinannya.

Hadirnya kepentingan elite yang di sinyalir tak hanya berasal dari kalangan politisi semata, namun juga atas desakan dari elite pengusaha yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Tri Risma ini sangat kental terlihat mengingat tak sedikit politisi yang menggugat Tri Risma, yakni sebagian besar kalangan DPRD Kota Surabaya merupakan elit politik yang memiliki hubungan erat dengan elite pengusaha elite pengusaha, dan bahkan politisi DPRD tersebut merupakan pelaku ekonomi/pengusaha tersebut.

Dalam perjalanannya wacana pemakzulan Tri Risma ini memiliki dinamika yang sangat menarik jika kita kaji lebih dalam. Dinamika pemakzulan yang bermula dari salah satu kebijakan risma yang dirasa kurang menguntungkan bagi sebagian pihak ini, yakni kebijakan pajak reklame sebagai salah satu contoh, menjadi awal dari kebijakan para politisi DPRD Surabaya yang kemudian bertransformasi menjadi Surat Keputusan DPRD Kota Surabaya No. 02 tahun 2011 tentang pemberhentian Walikota Surabaya yang kemudian dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa keterikatan antara elite politik dan kekuatan ekonomi tak dapat dilepaskan, sehingga tak jarang kepentingan-kepentingan ekonomi banyak mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh elite politik. Konflik kenaikan tarif reklame sebagaimana kita bahas sebelumnya mungkin bisa menjadi contoh bagaimana keterikatan tersebut ada dan terus berlangsung. Bahkan tak sedikit kekuatan - kekuatan ekonomi tersebut bertransformasi langsung menjadi elite politik sehingga kepentingan - kepentingan yang ada pun akhirnya bertumpang tindih.

Dinamika elite politik yang ada di Surabaya dalam perkembangannya tentang kasus pemakzulan ini mengalami kejadian - kejadian yang cukup menyengangkan. Mulai dari statement pengunduran diri Bambang D.H dan sikap PDI-P yang notabenehnya merupakan partai pendukung Risma malah menyepakati wacana pemakzulan, menunjukkan bahwa dinamika elit politik merupakan suatu hal yang tak pasti. Kini pembuktian akan kejutan-kejutan dalam konflik pemakzulan risma ini berlanjut ketika kemudian fenomena-fenomena politik bermunculan yang bahkan sebelumnya mungkin tak pernah kita pikirkan.

Dalam dinamika elit politik surabaya berkaitan konflik pemakzulan tersebut, kita dapat melihat fenomena-fenomena menarik yang mungkin masih belum kita ketahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Disinilah yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Begitu menariknya dinamika elit politik surabaya yang diwarnai begitu banyak kepentingan dan prosesnya yang sulit di tebak ini menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Bagaimana kemudian kepentingan-kepentingan yang berjalan dalam proses tersebut menjadi fokus yang begitu menarik untuk di bahas.

Hadirnya kepentingan elite yang di sinyalir tak hanya berasal dari kalangan politisi semata, namun juga atas desakan dari elite pengusaha yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Tri Risma ini sangat kental terlihat mengingat tak sedikit politisi yang menggugat beliau. Penelitian ini sendiri ingin mengungkap berkaitan siapa sajakah elite atau kekuatan-keuatan yang terlibat dalam konflik tersebut serta kepentingan apa saja kah yang sedang dipertarungkan dalam panggung politik lokal tersebut.

Bagi penulis sendiri, meskipun kemudian keputusan akan pemberhentian wacana pemakzulan tersebut banyak digawangi oleh peran partai politik, namun yang paling mencolok ketika kita lihat lebih kedalam adalah peran elite - elite politik yang kemudian menyeter bagaimana partai politik harus berjalan dan mengambil keputusan. Peran elite - elite politik

iniilah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait bagaimana kemudian dari dinamika elite tersebut, wacana akan pemakzulan muncul dan kemudian menghilang. Sekali lagi, dari peran - peran elite politik inilah yang bagi penulis banyak menentukan keputusan - keputusan penting yang akhirnya merubah “jalan cerita” panggung perpolitikan Surabaya. Dari sinilah, penulis dalam skripsi ini mencoba mendeskripsikan bagaimana hubungan-hubungan terkait kepentingan - kepentingan elite - elite politik Surabaya berdinamika dalam panggung politik. Hubungan-hubungan yang sensitive inilah yang akan coba dibongkar lebih dalam guna memahami dan mampu menjelaskan bagaimana sebenarnya “sesuatu” itu terjadi.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dapat diangkat dalam makalah ini adalah :

1. Kepentingan-kepentingan apa saja yang dibawa oleh elite - elite dalam wacana pemakzulan walikota Surabaya?
2. Bagaimana peta dan eskalasi konflik pemakzulan walikota Surabaya?
3. Mengapa terjadi berubahnya sikap - sikap elite politik dan partai politik dari yang sebelumnya mendukung wacana pemakzulan sehingga kemudian menarik dukungan tersebut?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana sebuah proses politik yang didalamnya terdapat proses negosiasi, lobi dan barter kepentingan, selalu menjadi kajian yang menarik dalam semua kasus fenomena politik. Berangkat dari pendekatan Post Positivis, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana “*behind the scene*” dari sebuah fenomena politik yang ada di Surabaya, yang dalam hal ini yakni Pemakzulan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Secara singkat, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kemudian proses-proses negosiasi, lobi dan bahkan barter kepentingan terjadi dalam upaya-upaya beberapa kekuatan politik untuk me-goalkan pemakzulan terhadap pimpinan eksekutif tertinggi di surabaya.

Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini tentu saja dapat memberikan wawasan baru dan bahkan menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa lainnya yang hendak mengkaji permasalahan-permasalahan politik dengan berorientasi pada substansi yang keluar dari pemahaman-pemahaman normatif belaka. Dalam hal tema penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti berharap dengan adanya penelitian yang bertajuk “Dinamika Elite dalam Politik Surabaya, Studi Konflik Pemakzulan Walikota Surabaya” ini, para akademisi lainnya dapat memahamai lebih jauh tentang persoalan tersebut, dimana proses-proses kepentingan politik yang ada tidak hanya berkutat pada hal-hal normatif belaka.

Kerangka Teori

Teori Elite – Suzanne Keller

Elite menurut Suzzana Keller, berasal dari kata *elligere*, yang berarti memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi. Dalam arti umum elite menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Dengan kata lain, elite adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya².

Perbedaan yang tidak mungkin terelakkan di antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dinyatakan sebagai titik awal bagi munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai keunggulan apabila dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya dalam masyarakat yang sama. Anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok elite. Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka tergabung dalam kelompok elite yang mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan lainnya yang tidak memiliki keunggulan. Sebutan elite atau terminologi elite, sebagaimana diungkapkan oleh Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Suzanne Keller dan pemikir yang tergolong dalam elite theorists, memang menunjukkan pada kelompok atau golongan yang ada di suatu masyarakat

² Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1995, hlm. 33.

yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya³.

Keller menambahkan terdapat empat proses sosial utama yang mendorong perkembangan elite yakni : (1) pertumbuhan penduduk, (2) pertumbuhan spesialisasi jabatan, (3) pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi, (4) perkembangan keagamaan moral. Konsekuensinya, kaum elite pun semakin banyak, semakin beragam, dan lebih bersifat otonom⁴.

PANGGUNG POLITIK SURABAYA

Sumber Konflik Politik Eksekutif vs Legislatif Surabaya

Aroma persaingan politik di Surabaya telah terasa semenjak suksesi kepemimpinan Surabaya 1 menghangat dan menuju pada pemilihan walikota Surabaya. Pemilihan yang diselenggarakan pada tahun 2010 tersebut awalnya terdiri dari pasangan calon walikota dan wakil walikota yang berasal dari unsur partai politik serta muncul dari kalangan independen. Tercatat, terdapat 4 pasangan yang berasal dari penunjukkan dan pemilihan oleh partai politik yang ada di Surabaya, serta 2 pasangan yang berasal dari kalangan independen. Ke enam pasangan inilah yang kemudian mendaftar sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Surabaya.

Keenam pasangan tersebut diantaranya yakni, Bagio Fandi Sutadi-Mazlan Mansyur yang diusung oleh PKB dan *Partai* Gerindra, Arif Afandi-Adies Kadir yang diusung oleh partai Demokrat dan Golkar, Tri Rismahariniharini-Bambang Dwi Hartono diusung oleh PDI-P, Fandi Utomo-Yulius Bustami yang diusung oleh PPP, PKS, PKNU, dan PDS, Fitradjaja Purnama-Naen Soeyono dan Alisjahbana-Chrisman Hadi yang berasal dari kalangan independen. Namun, dalam perjalanannya hanya 5 pasangan yang lolos seleksi persyaratan oleh KPU Surabaya, sedangkan pasangan Alisjahbana-Chrisman Hadi dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh KPU Surabaya.

Dalam pemilihan walikota Surabaya yang kemudian dimenangkan oleh pasangan yang diusung oleh PDI-P, yakni pasangan Tri Rismahariniharini-Bambang Dwi Hartono, telah diketahui sejak awal bahwa kemudian perjalanan pemerintahan pasangan tersebut akan terjal

³ Haryanto, *Kekuasaan Elit; Suatu Bahasan Pengantar*, PLOD-JIP Fisipol UGM: Yogyakarta, 2005, hlm. 66.

⁴ *Op Cit*, Suzanne Keller, hlm. 87.

mengingat jumlah dukungan yang dimiliki oleh PDI-P dalam kursi legislatif di DPRD Surabaya terbilang tidak begitu besar, yakni hanya memiliki 8 kursi.

Argumentasi bahwa pemerintahan Tri Rismaharini-Bambang Dwi Hartono akan menemui jalan yang terjal terbukti ketika kemudian dalam perjalanannya, pasangan ini, terutama Tri Rismaharini selaku walikota menghadapi ancaman impeachment oleh sebagian besar anggota legislatif DPRD Surabaya.

Pemerintahan yang berjalan seumur jagung ini dinilai oleh beberapa elite dalam DPRD Surabaya melakukan beberapa kesalahan-kesalahan yang menyebabkannya pantas untuk di makzulkan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu informan dalam penelitian ini, yakni wakil ketua komisi D DPRD Surabaya Fraksi Golkar, Eddie Budi Prabowo, dia mengatakan bahwa konflik antara legislatif dan eksekutif yang kemudian berujung pada wacana impeachment oleh DPRD Surabaya, dikarenakan kebijakan Tri Rismaharini yang memandang bahwa kenaikan pajak reklame tidak memiliki dampak yang signifikan, dinilai salah oleh anggota legislatif yang membidangi urusan Perekonomian tersebut.

Baginya, kebijakan reklame yang kemudian berbuah pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 mengenai kenaikan pajak reklame dan Perwali Nomor 57 Tahun 2010 mengenai kenaikan pajak reklame di kawasan terbatas memiliki dampak yang luar biasa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya. Pernyataan tersebut sebagaimana kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan anggota legislatif yang berasal dari fraksi Golkar tersebut:

“...Sebetulnya begini, konflik itu bermula dari kebijakan walikota yang bisa merugikan kepentingan masyarakat banyak di satu sisi ya, memang karena beliau menilai bahwa kenaikan pajak reklame itu tidak berdampak, tapi kita yang dari DPRD melihat bahwa itu dampaknya sangat luar biasa terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Itu aja awalnya konfliknya...”

Eddie menambahkan, bahwa kebijakan yang dikeluarkan Risma merupakan kebijakan yang gegabah mengingat Risma sendiri mengeluarkan kebijakan tersebut di masa pemerintahannya yang seumur jagung dan tanpa konsultasi dengan kalangan DPRD Surabaya. Eddie menjelaskan, bahwa ketika kemudian DPRD Surabaya bersikap terhadap kebijakan Risma, pihak Risma sendiri malah ketakutan dan kemudian berkonsultasi dengan Gubernur sehingga mengeluarkan perwali baru yakni perwali 70 dan 71. Alasan yang mengada-ada dari Risma inilah yang dianggap oleh anggota DPRD Surabaya menjadi latar belakang dari ketakutan Risma

ketika kemudian hak interpelasi diajukan, Pansus dibentuk dan wacana Pemakzulan digulirkan. Berikut merupakan kutipan pernyataan sebagaimana dilakukan dengan penulis:

“...jadi pada waktu itu kita melihatnya emang gak bener risma itu, dilantik tanggal 26, 27 sudah mengeluarkan perwali itu tanpa konsultasi pada mana mana pun, toh akhirnya dia begitu rame2 disini di interpelasi dia konsultasi kepada gubernur yang lebih atas, akhirnya dirubah perwali itu yang tadinya dinaikan 400 – 500% diturunkan juga, diganti dengan perwali 70 & 71. Disini (DPRD) kita lagi mempeributkan perwali 70 & 71 dia lari sendiri kesana, ketakutan.. Karena memang alesannya dia tidak kuat dan mengada – ada...”

Terkait dampak yang akan di timbulkan dari kebijakan kenaikan tarif reklame tersebut, Eddie menjelaskan bahwa dengan tarif pajak yang melambung menjadi 400%, pada akhirnya akan membebani pengusaha. Disini akhirnya pengusaha akan lari pada media non-reklame ataupun menggunakan reklame diluar surabaya, yang mana hal inilah yang kemudian akan membuat pendapatan asli daerah Surabaya menjadi menurun. Hal ini sebagaimana dikemukakannya berikut:

“...jadi misalnya seperti ini dengan dinaikkan nya pajak reklame otomatis kan banyak yang turun karena tidak terjangkau, kita melihat tidak terjangkau darimana, karena kita membandingkan surabaya dengan jakarta, jakarta itu diruas jalan yang utama disana pada waktu itu kita melihat tarifnya hanya 150jt/thn pajaknya, di surabaya sebelum ada kebijakan perwali itu tarifnya 140jt/thn kan wajar masih imbang, tapi setelah kebijakan itu, disini jadi 500jt/thn. Kan tidak masuk akal, lha pengusaha kan jadi lari semua kalo sudah seperti itu. Kalo sudah tidak di media luar ruang akhirnya kemana kalo bukan ke televisi atau ke media cetak. nah ini lah yang terjadi tarik menarik kesitu, risma terbawa ke situ. Yang berbahaya adalah PAD akan turun karena semua pengusaha reklame lari ke kota luar sby seperti sidoarjo, gresik karena disitu pajaknya murah. Karena di sby naik hingga 400% disana tidak naik, kan rugi masyarakat sby dan risma berdalih bahwa surabaya adalah primadona, berapapun kenaikan pajak reklame tidak akan mempengaruhi pengusaha dan tetap tertarik untuk memasang reklame disini...”

Apa yang dikemukakan oleh Eddie diatas, rasanya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh salah satu informan dalam penelitian ini yang sengaja diwawancarai guna melihat lebih luas aspek-aspek yang ada dal konflik ini. Informan kali ini berasal dari dunia usaha yang kemudian diwakili oleh Diar K. Putra yang merupakan salah satu pengurus di KADIN Jawa Timur. Diar mencoba bersikap secara strategis dengan mengemukakan bahwa pada dasarnya kelompok dunia usaha akan dengan taat mematuhi apa yang kemudian sudah menjadi peraturan yang digariskan oleh pemerintah. Namun, dalam kebijakan kenaikan tarif reklame ini, menurutnya walikota terlalu gegabah dalam memutuskan kebijakan tersebut lantaran belum adanya sosialisasi terhadap kalangan dunia usaha yang terkait. Dalam kebijakan yang ia rasa memiliki kenaikan tarif yang sangat signifikan ini, pemerintah kota harusnya juga memahami bahwa perlua adanya tahapan tertentu supaya dunia usaha dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Hal tersebut ia kemukakan sebagaimana berikut:

“...kalo kebijakan mengenai peningkatan tarif iklan, kalo peningkatannya itu sangat signifikan sebaiknya ya di sosialisasikan dulu dengan kelompok2 pengusaha yang terkait, pengusaha iklan, asosiasi pengusaha iklan disosialisasikan, dan tentunya mereka semua akan diberika pemahaman mengenai dasar2 peningkatan. Tapi idealnya peningkatan itu bertahap, artinya jika peningkatan lebih dari 100% itu dibuat paling gak program 3 thn, tahun pertama naik brp, kedua naik brp, trus tahun ke 3 baru 100%. Jadi biar gak kaget juga...”

Diar sendiri mengungkapkan banyak hal terkait dengan kebijakan kenaikan tarif pajak reklame ini. Menurutnya terdapat hal yang juga penting dalam usaha reklame yang harus diurus oleh pemerintah, yakni dana non teknis yang seringnya ditetapkan kepada kalangan usaha dengan nominal yang sering berubah-ubah. Ia sekali lagi menegaskan bahwa kalangan usaha pasti akan mentaati apa yang kemudian sudah menjadi peraturan, namun pemerintah juga harus bisa menjamin bahwa faktor nonteknis dalam usaha reklame dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh Pemkot, karena yang terpenting bagi dunia usaha adalah jaminan kepastian yang di dapat dari pemerintah. Berikut pernyataan pengusaha muda tersebut:

“...karena kita tahu sendiri ya apalagi urusan dengan pemerintah itu faktor non teknis nya juga diperhatikan, artinya kalo peningkatan yang signifikan hingga 100-200% itu mereka juga harus bisa menjamin pemangkasan hal2 non teknis, karena faktor non teknis ini yang merepotkan pengusaha, karena non teknis kan gak ada ukurannya. Kalo pengusaha itu gini, berapapun mahalnya kalo pasti itu bisa dipahami oleh mereka, karena mereka tinggal memasukkan ke beban biaya aja, tapi yang susah itu ketidak pastian itu, kalo non teknis kan banyak ketidak pastian, nah itu kita susah memasukkan ke dalam anggaran. Katakanlah saya ada tambahan biaya 1jt-10jt kalo pasti itu ga masalah, tapi kalo non teknis itu kadang 1jt kadang bulan depan 5jt itu yang repot karena g pasti. Pengusaha itu kan g bisa jualan terus harga berubah2, kita juga akhirnya pasar tidak percaya lagi sama kita...”

Diar sendiri juga tidak serta merta menyalahkan Risma karena dia juga memahami apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Risma. Maksudnya, Diar paham bahwa walikota sendiri ingin mengikis kultur-kultur yang ada sebelumnya dalam dunia usaha dan kemudian malah merugikan negara. Namun, baginya akan juga tidak adil jika kemudian yang terbebani oleh kebijakan tersebut hanyalah dunia usaha tanpa adanya kejelasan akan banyak hla terutama faktor-faktor non teknis yang ada dalam dunia usa reklame. Hal tersebut ia kemukakan sebagaimana berikut:

“...mungkin dasar pemikiran bu Risma pada waktu itu, katakanlah kalo kita pasang billboard diluar itu dana yang harus kita keluarkan kepada pemkot itu puluhan juta hingga ratusan, tapi biaya resminya ga sampai segitu harusnya, mungkin kalo biaya yang kita keluarkan smpai ratusan, biaya resminya dibawah 40jt atau 30jt, mungkin bu risma ingin merubah kultur tersebut. Daripada you bayar segitu banyak, you bayar ratusan juta untuk ijin reklame dan berbagai macam. Itu porsi nya harus dirubah, yang formal masuk kas negara itu harus dipisahkan dari nonteknis ya, tapi itu kan harus disosialisasikan, artinya kan kalo disosialisasikan akan terjadi komunikasi, toh tidak merubah pengeluaran kita, tapi tolong ditertibkan masalah perijinan, IMB segala macem, artinya tolong ditertibkan dan dibuat aturan yang jelas.. misalnya ijin pendirian reklame, kertajaya ABCDE.. tarifnya brp, IMB

tarif brp misalkan 5jt, terus perijinannya untuk ukuran sekian x sekian katakanlah 10jt, dan itu dituliskan juga IMB 5jt waktu 3 hari. Sekarang kan hanya persyaratan harganya berapa waktunya kita tidak tahu, kalo g ada deadline waktu dan pengusaha lagi tidak ada uang terus cuman dikasi biaya resmi aja oleh pemerintah katakanlah 1jt tapi gak ada amplop2 dibawah mejanya, jadinya ya ditinggal, ini kalo dibiarin bisa 1bulan 2 bulan, tapi kalo ada ketentuan yang pasti, biaya resmi, katakanlah 1jt masa 3 hari, yauda jelas saya tunggu 3 hari, aturannya jelas...”

Di lain hal, Eddie mengemukakan bahwa alasan kebijakan penataan reklame guna meminimalisir resiko reklame roboh untuk melindungi masyarakat merupakan alasan klasik yang dinilai menunjukkan ketidak mampuan pemerintah untuk mengatur hal teknis semacam itu. Baginya alasan tersebut menjadi tidak masuk akal karena pemerintah bukannya telah memiliki dinas terkait yang mengurus dan mengawasi tentang kajian yang berhubungan dengan penataan dan pembangunan reklame disuatu tempat. Menurutnya jika kemudian terdapat kasus yang mengakibatkan robohnya suatu reklame, hal tersebut dikarenakan terdapat permainan antara pengusaha dengan aparat terkait dalam mengakali anggaran pembangunan kampanye. Hal tersebut dikemukakan oleh Eddie dalam kutipan wawancara berikut dengan peneliti:

“...Itu alasan klasik karena yang menurut saya persoalan roboh atau tidaknya itu kan ada dinas yang terkait dalam hal ini ada dinas PU Cipta Karya, sebelum reklame itu dibangun itu pasti dilakukan kajian macem2, uji tanah, uji kelayakan konstruksinya, itu diuji dan dirapatkan dalam tim, kalo sampe terjadi IMB konstruksi reklame itu keluar kemudian reklame itu roboh berarti kan ada yang tidak beres pada saat pelaksanaannya, ketidakberesan ini ya ada permainan antara pengusaha dengan aparat yang terkait dalam hal itu, misalnya besi yang disyaratkan 35 dim ternyata supaya mengirit anggaran menjadi 30, itu kan rawan roboh. Tapi kalo alasan itu yang dibuat itu sangat tidak masuk akal, apa gunanya ada dinas yang mengawasi...”

Bagi Eddie sendiri, keputusan untuk menaikkan tarif pajak reklame menjadin kesalahan terbesar Risma hingga kemudian dia harus menghadapi wacana Pemakzulan yang diinisiatifi oleh kalangan DPRD Surabaya. Dia menambahkan bahwa, besar kemungkinan karena kelemahan Risma dalam melakukan komunikasi politik serta pengutamaan akan kepentingan kelompoknya sendiri menjadi faktor dominan kenapa kemudian wacana pemakzulan tersebut muncul. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Eddie selaku informan yang berasal dari kalangan DPRD berikut:

“...Ya ituu, dia terlalu terburu2 dalam mengeluarkan perwali, kan bisa dibicarakan dengan kita, kita belum menerima penjelasan mendadak sudah seperti itu kemudian dari kelompok2 masyarakat yang merasa dirugikan itu kan mengadu ke kita, bisa juga karena komunikasi politik dari walikota kurang mungkin karena baru dia terburu2 dalam mengutamakan kepentingan kelompoknya dia...”

Sedangkan dalam kesempatan yang lain, wakil ketua pansus hak Interpelasi dalam kasus kenaikan pajak reklame dari fraksi PKB, Masduki Tohaa, mengemukakan hal yang tak

jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh temannya Eddie diatas. Baginya, surat protes yang kemudian di layangkan kepada walikota dan kemudian tak direspon secara baik menjadi salah satu alasan kenapa kemudian sebagian besar anggota DPRD Surabaya menggunakan hak interpelasinya kepada pemerintah kota Surabaya. Dalam penjelasan lanjutnya, Masduki Tohaa mengemukakan bahwa selaku wakil rakyat, dia menerima komplain yang menyatakan keberatan dari kalangan usaha tentang kenaikan pajak reklame tersebut. Pernyataan anggota legislatif yang juga menjadi inisiator wacana impeachment tersebut sebagaimana kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagaimana berikut:

“...Saya waktu itu menjadi wakil ketua pansus interpelasi itu adalah tentang perwali walikota yang mengatur tentang reklame, dimana ada keberatan dari beberapa pihak tentang kenaikan yang dikatakan terlalu signifikan, jadi kenaikan yang sangat luar biasa dan sudah dilakukan protes kepada walikota, sudah disurati tapi tidak mendapatkan respon, sehingga mereka (pengusaha) lari nya kesini melaporkan masalah ini, kita sudah banyak mengundang mereka dan mendiskusikan, dprd pun sudah memberikan surat kepada walikota tapi tidak ada tanggapannya.. itulah yang mendasari hak interpelasi, sebenarnya hak interpelasi itu hak bertanya kepada saudari walikota, knp koq bs sampai terjadi seperti ini? Yang bs menjawab kan saudari walikota, jadi untuk sebelum kita memanggil walikota kita panggil bawah2nya dulu, kenapa koq yang namanya perwali itu harus muncul, itu aja...”

Selain apa yang dikemukakan diatas, Musdaki juga mengatakan bahwa tak salah jika DPRD Surabaya kemudian memunculkan wacana pemakzulan. Hal ini terkait dengan surat DPRD Surabaya terkait perwali dalam kewenangan DPRD menggunakan hak interpelasinya tidak digubris oleh Walikota selama 2 kali surat tersebut dilayangkan. Hal tersebut dikemukakan oleh Masduki berikut:

“...Ya itu sebenarnya dengan perwali itu, karena dia tidak merespon suratnya dari DPRD 2x, maka salah satu hak dalam undang2 yang diberikan oleh DPRD adalah hak interpelasi, maka salah satunya itu untuk membawa walikota kesini dengan paksa, hak iterpelasi itu kan dilaksanakan untuk memanggil orang2 yang merasa berjasa untuk menerbitkan suatu permasalahan (perwali) ya tak undang lah mereka kesini dengan interpelasi itu, karena kita punya kekuatan hukum, kalo 3x dipanggil tidak datang kita bisa meminta kepolisian menjemput paksa, kalo cuman hearing2 begini nggak bisa...”

Ketika kemudian Pemerintah kota memenuhi undangan DPRD dalam rangka hak Interpelasi terhadap perwali kenaikan tarif pajak reklame, dan terjadi tanya jawab antara eksekutif dan legislatif yang ada di DPRD Surabaya, sebagian besar anggota DPRD Surabaya merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh pihak walikota Surabaya. Daris inilah kemudian muncul wacana atau pendapat dari salah satu fraksi untuk kemudian memakzulkan risma dari kepemimpinannya sebagai walikota Surabaya. Hal ini dikemukakan oleh Eddie sebagaimana berikut:

“...Makanya dari pertanyaannya saudara yang tadi tentang peran dari ketua tadi itu kan saya katakan seperti itu, jadi itulah yang sebenarnya ada beberapa hal yang dilewati, karena bertanya itu tidak dijawab dan tidak sesuai dengan pertanyaan kita maka salah satu itu pendapat fraksi itu untuk pemakzulan itu, kan interpelasi itu diberikan untuk memberikan pendapat dari walikota itu, jadi sebenarnya itu karena jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya kita. Itu kan dalam undang undang diperbolehkan juga..”

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang lain, yakni Ine dari Fraksi Demokrat, menunjukkan bahwa menurutnya DPRD Surabaya tidaklah memiliki permasalahan pribadi sebagaimana yang banyak dituduhkan oleh sebagian pihak. Baginya, turunya perwali 56 dan 57 yang sebelumnya tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada kalangan DPRD lah yang menjadi awal mula permasalahan tersebut berujung pada wacana pemakzulan. Ine sendiri mengemukakan, bahwa pembuatan perwali tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Ia menegaskan bahwa yang salah dalam hal ini bukan lah “anak buah” nya tapi “jenderal” nya yang kemudian berani pasang badan dengan kebijakannya tersebut. Itulah kemudian mengapa hadir hak interpelasi yang kemudian juga hadir pula pansus yang mengurus permasalahan kenaikan pajak tersebut yang dirasa melangkahi DPRD Surabaya dan sekali lagi ia tegaskan bukan lantaran ada deal-deal politik antara sesama politisi untuk menjatuhkan risma ataupun dengan pengusaha. Hal tersebut ia kemukakan sebagaimana berikut:

“...Berbicara tentang pemakzulan 1 tahun yang lalu, untuk masalah pribadi DPRD dengan ibu risma itu tidak ada, tapi karena kita melihat perwali waktu itu tahun 56 & 57 mengenai reklame itu dikarenakan tidak adanya sosialisasi ke kita, kenaikan pajak reklame dan segala macam, seperti halnya hak interpelasi itu kan hak bertanya ya, kita selidiki apa memang proses pembuatan perwali itu artinya tidak sesuai dengan mekanisme, jadi waktu itu memang ibu risma pasang badan, bukan anak buahnya yang salah tapi jendralnya yang salah, jadi kalo misalkan disini ada tulisan ada deal politik antara DPRD dengan pengusaha itu enggak, karena kita kan menyelidiki ya mas ya.. kita bertanya secara urutan dengan pihak yang terkait, siapa yang membuatnya dan siapa yang merencanakan draft – draft nya itu dengan mengacu kepada apa, undang2 yang tertinggi itu apa, semuanya kita periksa , bertanya kepada skpd dan walikota itu, jadi memang tidak ada deal2an...”

Semua informan dalam penelitian ini, sepertinya sepakat bahwa kemudian awal mula konflik dalam panggung politik di Surabaya ini diawali oleh kebijakan pemerintah Tri Rismahariniharani yang mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 mengenai kenaikan pajak reklame dan Perwali Nomor 57 Tahun 2010 mengenai kenaikan pajak reklame di kawasan terbatas. Hal ini terlihat, bukan hanya dari kalangan DPRD Surabaya yang mengemukakan tersebut, namun juga dari pihak Tri Rismahariniharani sendiri yang dalam penelitian ini akan banyak diwakili oleh staff ahli ekonomi dan staff ahli hukum walikota Surabaya.

Bagi Emanuel Sujatmiko yang merupakan staff ahli walikota bidang hukum, kebijakan walikota yang mengatur reklame yang berukuran besar akan dikenai kenaikan pajak yang lebih besar pula dirasa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh sebagian besar anggota legislatif. Pernyataan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Emanuel dalam kutipan wawancara berikut:

“...Sebetulnya pada saat awal bu Risma diangkat menjadi walikota sebetulnya ada kebijakan walikota yang mengatur tentang reklame sehingga reklame yang besar itu akan dikenakan pajak yang lebih tinggi dan juga ada pembatasan, itu lah yang membuat temen2 dprd melihat bahwa kebijakan itu bertentangan dengan peraturan perundang2an. Sehingga bu Risma dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang – undang...”

Dalam penjelasan yang dikemukakan oleh staf ahli walikota bidang hukum tersebut, yang dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh banyak pihak yakni bertentangan dengan Pasal 28 (a) UU 32/2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Emanuel juga mengklarifikasi tentang tuduhan yang dikemukakan oleh sebagian anggota DPRD yang mengatakan bahwa Risma mengeluarkan perwali 71 & 72 dikarenakan ketakutan akan intervensi DPRD dalam pemerintahannya. Baginya, hal tersebut adalah tidak benar, karena latar belakang dirubahnya perwali sebelumnya menjadi perwali 71 & 71 dikarenakan Risma juga berkonsultasi dengan Gubernur selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam rangka pengawasan dalam pemerintahan daerah. Inilah yang kemudian mendasari kebijakan walikot untuk merevisi perwali tarif pajak reklame yang sebelumnya. Hal tersebut dikemukakan oleh informan sebgaimana berikut:

“...Lho bukan, walikota merivisi karena perintah gubernur, karena itu diperintah oleh gubernur karena apapun juga jika Gubernur memerintahkan untuk merivisi maka walikota harus merivisi, karena gubernur itu representasi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam rangka pengawasan dalam pemerintahan daerah. Kalau walikota tidak merivisi maka walikota salah dan peraturan itu tidak dapat diterapkan. Jadi itu bukan karena ditekan oleh DPRD melainkan karena perintah gubernur, Sedangkan apakah gubernur merasa ditekan oleh DPRD saya tidak tahu karena itu adalah ranah lain...”

Penjelasan lain, juga didapatkan penulis dari staf ahli walikota bidang ekonomi, Subagyo. Menurutnya, permasalahan utama yang menyulut konflik antara eksekutif dan legislatif di Surabaya tidak ia ketahui secara pasti, namun lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa kalangan DPRD Surabaya lah yang kemudian menjadikan persoalan pajak reklame menjadi “media” konflik tersebut. Hal ini sebagaimana ia kemukakan “*Haha.. itu saya ndak tahu ya, tapi..*”

medianya yg dipake oleh DPRD adalah persoalan pajak reklame, tapi apa latar belakangnya saya ndak ngerti gitu ya”.

Lebih detail ia mengemukakan bahwa kebijakan Risma dalam menaikkan pajak reklame di dasari oleh pertimbangan yang cukup lama. Baginya, pajak reklame yang tidak pernah naik semenjak terakhir dipimpin oleh Sunarto Sumoprawiro ini, menyebabkan menjamurnya reklame di sembarang tempat di Surabaya sehingga mengganggu estetika kota. Meskipun pernyataan dari staf ahli ekonomi walikota ini dinilai klasik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Eddie Budi Prabowo, wakil ketua komisi D dari Fraksi Golkar, namun baginya pembatasan reklame-reklame yang ada di Surabaya menjadi suatu hal yang penting. Dia mengemukakan bahwa yang menjadi roh dalam dalam aturan pajak yakni adanya pajak yang disebut pajak progresif. Pajak tersebutlah yang kemudian menjadi perwali dan berfungsi sebagai reguriter, mengatur, mengarahkan dan membatasi reklame-reklame yang besar. Lebih tegas ia kemukakan bahwa pengaturan pajak reklame yang dikeluarkan oleh pemerintah kota, sebenarnya bukan berdasar pada tujuan untuk mengejar penerimaan kota sehingga bertambah banyak, tapi lebih kepada pengaturan estetika kota. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh staf ahli walikota tersebut dalam salah satu kutipan wawancara dengan penulis sebagaimana berikut:

“...jadi kalo reklame yang besar2 itu kan pemerintah memungut pajak dengan pajak reklame, tapi kan reklame itu kan ukurannya macem2, ada yang kecil, ada yang ukurannya besae, nah pajak reklame itu sudah lama tidak pernah dinaikkan sejak jamannya sebelumnya pak bambang, ketika jamannya pak bambang saya pernah diajak berembuk dengan dinas pendapatan untuk menaikkan pajak reklame itu, menata kembali lah, nah terus akhirnya jadinya di tata kembali pajak reklame itu, untuk penataan itu mas jatmoko (staf ahli hukum) yang ngerti karena perdanya dia yang ikut bikin. Tapi kemudian 1 hal yang menjadi sukma / roh nya dari aturan pajak itu kan ada yang disebut pajak progresif, pajak itu kan fungsinya tidak hanya sebagai penerimaan negara ataupun pemerintah kota dalam hal ini perwali reklame tapi juga sebagai reguriter, mengatur, mengarahkan, nah salah satu point pengarahannya itu adalah untuk membatasi reklame2 yang besar yang lebarnya itu lebih dari 50 m2, kita kan g ingin dengan reklame yang besar2 itu karena itu mengganggu estetika kota, karena itu dibuat lah skema pajak yang disebut dengan pajak progresif, reklame yang besar2 itu pajaknya dinaikan supaya membatasi perusahaan reklame agar tidak pake reklame yang besar2 karena pajaknya mahal. Jadi lah 1 aturan dengan sk walikota mengenai pengaturan pajak reklame secara progresif, jadi yang besar2 pajaknya tinggi, yang sedang kebawah bisa saja diberi insentif karena pajaknya diturunkan, supaya harapannya ada migrasi dari reklame besar ke reklame yang sedang dan kecil, jadi disini poin nya adalah bukan pada penerimaan kota nya tapi lebih kepada pengaturan itu tadi, nah itu gak disetujui...”

Secara lebih lanjut, Subagyo juga mengemukakan bahwa ia menduga terdapat perusahaan-perusahaan reklame yang kemudian tidak sepatutnya dengan kebijakan tersebut seperti oxxxy, warnawarni, rainbow, dll. Hal tersebut ia kemukakan sebagaimana berikut:

“...saya menduga ada perusahaan2 reklame yang tidak sepakat dengan kebijakan itu karena subyek pajaknya kan perusahaan2 reklame itu, bukan pemasangnya yang gambarnya itu, tapi perusahaan reklame itu, seperti ada oxyy, warnawarni, rainbow, dll...”

Terkait dengan tuduhan yang dilakukan oleh Risma dalam mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif reklame yang kemudian dianggap merupakan kesalahan terbesar sehingga dia harus menghadapi ancaman pemakzulan, Subagyo selaku staff ahli ekonomi memiliki sudut pandang yang bertolak belakang dengan statement tersebut. Baginya, SK walikota tentang kenaikan tarif reklame yang kemudian berbentuk perwali, merupakan kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif daerah. Ia memaparkan, bahwa dengan gaya kepemimpinan Tri Rismaharini yang menginginkan pejabat daerahnya “*mengetatkan ikat pinggang*”, bahasa yang digunakan untuk merujuk pada upaya penghematan yang dilakukan Risma, maka kebijakan kenaikan tarif reklame menjadi suatu hal yang wajar guna meminimalisir budaya konsumtif yang kerap merugikan negara. Hal tersebut ia kemukakan sebagaimana berikut:

“...Saya melihat tidak ada kesalahan, gini ya.. SK walikota itu kan kewenangan walikota dalam melaksanakan kebijakan, kebijakannya itu tadi pembatasan reklame, alatnya pake perwali. Kalo pak Gubernur ikut ngomong kalo itu akan menyebabkan perekonomian merosot karena tidak ada reklame, tapi menurut saya koq enggak buktinya pertumbuhan ekonomi naik terus tuh tinggi terus tuh, berarti enggak kan, keliru juga omongannya oak gubernur. Buktinya gak ada kemrosotan ekonomi hanya karena iklan, iklan itu apa seh mas, pertama kan memperkenalkan produk, kedua kan menyuruh membeli produk, yaaa.. gitu kan, berarti reklame itu mendorong orang apa? Produkti apa konsumtif?, konsumtif kan.. nah kalo menurut masyarakat gimana konsumtif itu menurut para pemimpin, pemimpin itu selalu menganjurkan ketatkan ikat pinggang, berarti tidak konsumtif sementara reklame mendorong orang untuk konsumtif...”

Konflik yang kemudian menjadi berita hangat di sejumlah media massa baik lokal maupun nasional ini terbilang menarik karena terjadi ketika pemerintahan Tri Rismaharini masih berjalan selama 1 bulan. Banyak anggapan yang berkembang bahwa kemudian latar belakang Risma sebagai seorang birokrat murni membuatnya sulit menerima kepentingan-kepentingan politik yang terbiasa menggunakan jalan kompromi atau “sama-sama enak”. Dari sinilah kemudian muncul isu yang mengatakan bahwa konflik antara Risma selaku walikota dengan legislatif ataupun kalangan politisi kalau boleh dibilang, berjalan kurang harmonis karena Risma kurang mampu memahami bahasa kepentingan politis.

Emanuel Sujatniko sendiri melihat, bahwa memang latar belakang Tri Rismaharini yang murni sebagai seorang birokrat memiliki kekurangan dalam komunikasi secara politik. Namun baginya, dalam permasalahan kenaikan pajak reklame ini, dia menekankan bahwa permasalahan tersebut (kenaikan pajak reklame) hanya dijadikan alasan semata untuk menekan Walikota secara politik sehingga pada nantinya kepentingan-kepentingan DPRD yang ada dalam

perjalanan pemerintahan Tri Rismaharini tersebut dapat selalu terakomodir. Hal ini sebagaimana yang Emanuel kemukakan kepada penulis sebagaimana berikut:

“...Ya, kalo saya katakan kurang mampu itu sebetulnya juga setiap org mempunyai latar belakang. Bu Risma kan latar belakangnya birokrat sehingga cara berpikir birokrat itu lebih mengedepan daripada cara berpikir seorang politisi, itu sebetulnya sehingga ada perbedaan2 bagaimana cara berpikir politisi dan bagaimana berpikir seorang birokrat ini sebetulnya hanya bicara pada perbedaan2 itu gitu aja. Dan kalo kita kaitkan dengan permasalahan papan reklame itu sebetulnya hanya sebagai alasan bagi anggota DPR saja dalam rangka untuk memberi tekanan kepada walikota supaya apa yang diinginkan oleh anggota2 DPRD nanti bisa dituruti oleh walikota...”

Ketika kemudian menyinggung kemampuan komunikasi politik Risma, Emanuel memang mengakui bahwa walikota kurang mampu berpikir secara politis, namun masih upaya untuk mengakomodasi, dalam artian belajar memahami bahasa politik, tengah diupayakan bagi dirinya. Emanuel mengemukakan lebih jauh, bahwa tidak mudah bagi seorang yang latar belakangnya seorang birokrat murni harus dipaksakan secara cepat memahami bahasa-bahasa politik, namun sayangnya hal inilah yang menurutnya membuat kalangan DPRD tidak sabar untuk menunggu walikota mempelajari hal tersebut. Apa yang dikemukakan oleh staff ahli hukum walikota tersebut sebagaimana kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana berikut:

“...ya kalo komunikasi politik tadi saya katakan latar belakangnya berbeda, seorang birokrat yang baru naik jadi walikota, tentunya cara berpikir politisi dia tidak punya. Tentunya untuk mengubah ini akan memakan waktu tapi rupanya anggota dprd ini tidak sabar dengan waktu. Bu Risma sebagai walikota harus berpikir secara politis tapi tidak mudah untuk berubah langsung, proses inilah yang mereka (anggota dprd) tidak sabar, kalo saya melihat ada disitu...”

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Emanuel, Subagyo lebih melihat konflik antara eksekutif dan legislatif terkait kenaikan tarif pajak reklame lebih banyak dimotori oleh kepentingan ekonomi dan jauh dari kepentingan politik, baginya yang sejak semula tetap kekeh mengatakan bahwa alasan Tri Rismaharini mengeluarkan perwali 56 dan 57 merupakan tuntutan akan estetika kota surabaya yang dinilai mengalami penurunan ketika reklame tidak ditertibkan. Ia menambahkan bahwa, berbeda dengan kepentingan ekonomi, kepentingan politik selalu berlaku tidak adil kepada kelompok-kelompok tertentu, sedangkan dalam kebijakan Tri Rismaharini sendiri jauh daripada kepentingan semacam itu. Hal ini sebagaimana dia kemukakan berikut:

“...Bukan kepentingan politis, itu kepentingan ekonomi sama sekali, tidak.. tidak.. kepentingan politik ya, itu hanya kepentingan estetika kota, bukan kepentingan politis. Kalo kepentingan politis kan dia punya sasaran ya terhadap 1 kelompok tertentu, tapi ini enggak, nah kalo kelompok itu katakanlah di kerdilkan / dipukul gitu kan nanti itu macem2 kan

penerimaan pajak pusat juga berkurang, jadi tidak ada kepentingan politis, semata2 kepentingan ekonomi, kepentingan keindahan kota, itu tok...”

Subagyo menambahkan pengalamannya ketika dipanggil oleh DPRD, ia mengemukakan bahwa ketika rapat dengan DPRD Surabaya membahas alasan tentang kebijakan kenaikan tarif reklame dipandang dari sudut ekonomi, semua anggota DPRD tidak dapat berbicara banyak karena memang baginya hal ini lebih kepada kepentingan estetika kota, dan bukan masalah politik yakni adanya kesepakatan politis yang diambil oleh risma guna menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Hal ini ia kemukakan sebagaimana berikut:

“...kalo yang lain itu mereka ngasi pertanyaan saya jawab dan jelaskan mereka mantuk2 gitu, berarti mereka setuju sama saya, kan saya dari ekonomi jadi saya menjawabnya ya pada pemahaman ekonomi saya tentang itu dan memang itu semata2 keindahan kota, dan itu bukan masalah politik...”

Pada prinsipnya, konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif yang ada di Surabaya ini banyak menjadikan kebijakan Tri Rismaharini selaku walikota Surabaya tentang kenaikan tarif pajak reklame, khususnya reklame yang berukuran ukuran besar dengan kenaikan mencapai sekitar 300%, sebagai kebijakan yang cacat. Kebijakan yang dirasa tanpa berkonsultasi dengan para politisi yang duduk di kursi DPRD Surabaya ini lah yang kemudian membuat para legislatif tersebut merasa di langkahi dan tidak diakui keberadaannya sebagai mitra pemerintah.

Dalam perjalanannya, tentu penulis memahami bahwa sikap “kebakaran jenggot” yang dilakukan oleh sebagian besar anggota legislatif di DPRD Surabaya ini memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, mengingat perihal tarif reklame berkaitan dengan kalangan pengusaha yang dikenal kerap memiliki hubungan khusus dengan para politisi, dan bahkan ada sebagian pengusaha yang kemudian bertransformasi menjadi seorang anggota legislatif, merupakan permasalahan yang cukup penting bagi sejumlah pihak.

Dari sinilah kemudian penulis mencoba menggambarkan siapa saja kemudian elit yang memiliki kepentingan dalam konflik ini serta apa pula kepentingan yang di bawai oleh setiap elit yang terlibat. Hal inilah yang kemudian dibahas lebih lanjut oleh penulis dalam sub-sub bab selanjutnya.

Kostelasi Politik Lokal dan Nasional, Drama Kepentingan Politik di Surabaya.

Konstelasi Politik Episode I

Sebagaimana banyak dibahas dalam sub bab sebelumnya, bahwa bagi sebagian anggota legistaif di DPRD Surabaya, pemakzulan terhadap walikota Surabaya merupakan

keputusan yang telah melalui proses-proses politik seperti hak interpelasi terhadap walikota, serta hasil pansus yang dibentuk oleh DPRD Surabaya. Bagi salah satu informan dalam penelitian ini, Ine dari Fraksi Demokrat, hasil penyelidikan sebagai mekanisme yang ditempuh sehingga keluarlah wacana pemakzulan tersebut, merupakan rekomendasi yang dibawa kedalam rapat DPRD. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan anggota legislatif termuda tersebut guna menjawab tuduhan akan adanya kepentingan politik yang menjatuhkan karena hak interpelasi yang dilakukan oleh DPRD sendiri belum usai. Hal tersebut sebagaimana dikemukakannya berikut:

“...Itu kan ada pansusnya, saya kebetulan tidak ikut dalam anggota pansus, pansus itu menyampaikan kepada kami bahwa hasilnya seperti ini, itu keputusan pansus, pansus sudah melaksanakan pekerjaannya, dan kita sebagai anggota DPRD sudah menerimanya dengan riil, mungkin keluarlah keputusan itu, seperti itu.. Jadi kita memang kerja, kita selidiki, jadi ada mekanismenya, setiap fraksi menyampaikan jawabannya, dan jawabannya itu ada di kmaren itu, pansus memberikan rekomendasi bukan memutuskan...”

Sebagaimana terlihat dalam penjelesana sebelumnya terkait konstelasi yang ada ketika wacana tersebut digelontorkan, Masduki Toha mengemukakan hal yang sama bahwa baginya konstelasi saat itu sudah dangat mendukung untuk terjadinya pemakzulan terhadap Tri Risma. Dengan adanya dukungan dari 6 Frkasi yang ada di DPRD Surabaya, minus Fraksi PKS, maka sebenarnya wacana pemakzulan tersebut sudah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Masduki, “...*kontelasi politik sebenarnya waktu itu bagus, dari sini tingkat sini uda bagus, dari 7 fraksi ada 6 fraksi yang mendukung...*”.

Masduki menambahkan, bahwa partai nya sendiri, PKB, yang dalam hal ini juga berkontribusi menmpatkan wakil nya dalam pansus guna mengkaji kebijakan kenaikan tarif reklame, mendukung adanya pemakzulan karena menurutnya hal ini merugikan salah satu elemen yang ada di masyarakat, yakni pengusaha. Hal tersebut, dia kemukakan dalam kesempatan wawancara sebagaimana kutipan berikut:

“...tindak tanduk kita di pansus kita lakukan pada kesempatan pada waktu itu, ketua PKB itu menjadi wakil ketua disini, jadi setiap kita melakukan pembahasan langsung komunikasi kepada mereka, otomatis saya dengan partai ini nyambung, jadi kepentingan2 apa antara pansus dengan partai ini saya sampaikan dan jadi insyaallah bukan menentang atau pun bukan mendorong, kalo dirasa untuk kepentingan masyarakat banyak kita dukung penuh, pengusaha reklame juga bagian dari masyarakat, masyarakat kan macem2 ada yang bawah, menengah, atas. Pengusaha reklame memiliki 100 karyawan, ini kan harus kita lindungi juga kan gitu, ini dirasa baik untuk kepentingan rakyat, itu sebenarnya. Partai tidak mendorong atau melarang yang penting anda berada dalam jalan yang benar untuk kepentingan masyarakat banyak, maka laksanakan...”

Sama halnya sikap yang ditunjukkan oleh PKB sebagaimana yang dikemukakan oleh Masduki Toha, Eddie yang berasal dari Fraksi Golkar juga mengaskan bahwa dirinya dan partainya sejak semula mendukung adanya wacana dan keputusan pemakzulan yang dikeluarkan DPRD. Alasan bahwa dampak yang ditimbulkan kebijakan tersebut terhadap PAD Surabaya, serta kesewenang-wenangan pihak walikota membuat partainya mendukung 100% pemakzulan tersebut. Berikut sebagaimana dikutip dalam wawancara dengan informan tersebut:

“...Ya itu tadi, kita mendukung pemakzulan itu karena kebijakannya itu kan tidak bicara dengan kita yang kedua merugikan banyak pihak, kalau itu PAD tidak tercapai sedangkan kan sudah disusun oleh APBD terus kekurangannya ini ditambahi dari mana, kita dalam posisi yang mendukung pemakzulan pada waktu itu. Kita semua 100% mendukung dengan pemakzulan itu konstelasinya, sebelum ada peringatan dari masing2 pimpinan pusat tapi semua sudah sangat mendukung, semua setuju kalo dia di makzulkan, karena melihat dari anak buahnya, orang dekatnya walikota sendiri itu kan begitu arogan, kesewenang2annya kelihatan sekali, jadi semuanya mendukung 100% pada saat itu ya.. begitu peristiwa itu terjadi ketika semua mendorong untuk risma lengser, DPP masing2 memperingatkan, khusus golkar tidak dan terus lanjut...”

Eddie juga menceritakan pada penulis tentang bagaimana kemudian keonstelasi lebih jauh, khususnya sikap PDI-P yang notabene merupakan partai pengusung Tri Risma, malah bermanuver mendukung pemakzulan terhadap walikota yang diusungnya tersebut. Eddie mencium bahwa terdapat kepentingan di dalam sebagian internal PDI-P sendiri, yang menginginkan bahwa Risma lengser. Sikap PDI-P yang mengambang atau belum bersikap terhadap wacana pemakzulan, ketika kemudian proses tersebut masuk ke tahap interpelasi dan angket, PDI-P sendiri seakan menjadi pihak yang kemudian memboncengi kepentingan pemakzulan tersebut. Dari sinilah kemudian muncul sikap partai yang kemudian memutuskan untuk mendukung di makzulkannya walikota tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Eddie sebagaimana berikut:

“...memang ini kan politik mas dipenuhi oleh syarat2 kepentingan, pada waktu itu anginnya memang PDI-P sendiri yang sebetulnya sebagai partai pendukung (pengusung) Risma, membonceng disitu.. walaupun dalam proses pengajuan hak interpelasi itu dia (PDI-P) pura2nya menentang tapi pada saat sudah sampai interpelasi dan hak angket dia yang malah “nunggoni” .. seperti mereka mengatakan “Oo itu kurang tajam itu pertanyaannya..” “yang kesana, tambah lagi..” karena supaya walikota turun (lengser), jika walikota turun kan dia (Wisnu Sakti Buana Ketua DPC PDI-P) yang ngganti. Itu tercium disana...”

Sikap PDI-P yang kemudian mendukung pemakzulan disayangkan oleh Emanuel Sujatmiko. Bagi staf ahli hukum walikota ini, sikap PDI-P ini menunjukkan ketidak dewasaan politik. Ambivalensi yang ditunjukkan oleh PDI-P ini menunjukkan bahwa partai saat ini telah jamak meninggalkan etika politik dan juga menggosur pemahaman ideologis partai. Hal ini Emanuel ungkapkan dalam salah satu kutipan wawancara dengan penulis sebagaimana berikut :

“...ya saya kira sikap ampifelensi PDI-P itu adalah sikap yang tidak baik, karena bagaimana pun juga Risma dicalonkan oleh PDI-P maka PDI-P harus mendukung walikota, tapi justru PDI-P bermanuver lain dan bersebrangan. Ini kan kontra – produktif menunjukkan ketidakdewasaan politik. Justru menjadi kontra produktif dan menjadi suatu hal yang tidak etis, dan saya katakana banyak politisi² yang meninggalkan etika² politik, jadi etika itu sudah mungkin tidak lagi digunakan dan lebih mengutamakan kepentingan², saya tidak tahu apakah karena banyak partai politik yang dibangun tidak berdasarkan ideologis sehingga etika itu tidak ada lagi...”

Konstelasi Politik Episode II

Posisi eksekutif Surabaya yang sebelumnya sangat lemah karena diserang dari banyak sisi, dalam perjalanannya kemudian berbalik menjadi pihak yang paling diuntungkan. Hal ini terkait instruksi partai yang berada pada tingkatan di atas kepengurusan partai tingkat II (kota) kemudian memperingatkan dan akhirnya menginstruksikan supaya partai yang sebelumnya mendukung pemakzulan tersebut untuk mencabut dukungannya.

Dari konstelasi yang ada menunjukkan bahwa partai-partai yang memiliki kursi cukup besar di DPRD Surabaya, khususnya partai Demokrat dan PDI-P memiliki cerita menarik yang menunjukkan bahwa kepentingan politik yang menggawangnya sangatlah kental. Tercatat, hanya partai Golkar yang kemudian tetap meneruskan rekomendasi pemakzulan yang sebelumnya diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Surabaya.

Eddie berbicara banyak tentang sikap partainya kala itu, ketika itu, fraksi Golkar tetap mendukung 100% dari awal hingga kemudian terjadi manuver yang menyebabkan semua partai yang mendukung akhirnya mencabut dukungannya. Hal ini Eddie kemukakan sebagaimana kutipan wawancara yang dikemukakannya berikut:

“...Kita semua 100% mendukung dengan pemakzulan itu konstelasinya, sebelum ada peringatan dari masing2 pimpinan pusat tapi semua sudah sangat mendukung, semua setuju kalo dia di makzulkan, karena melihat dari anak buahnya, orang dekatnya walikota sendiri itu kan begitu arogan, kesewenang2annya kelihatan sekali, jadi semuanya mendukung 100% pada saat itu ya.. begitu peristiwa itu terjadi ketika semua mendorong untuk risma lengser, DPP masing2 memperingatkan, khusus Golkar tidak dan terus lanjut...”

“...Toh buktinya semua pada narik semua, jadi yang tadinya menggebu2 justru malah berbalik 180 derajat baik Demokrat maupun PDI-P, PDS juga. Hanya kita aja dari Golkar yang tetep terus ke pemakzulan walaupun akhirnya kalah di paripurna, tapi tetep kita ndak main2, karena menurut pandangan kita ini merugikan rakyat dalam satu sisi ya sudah kita teruskan...”

Eddie juga menjelaskan bahwa keputusan partai yang lain, terutama Demokrat dinilai sangat serius. Hal ini terlihat dari setidaknya kemudian ancaman sanksi yang kemudian diberikan oleh partai Demokrat terhadap kader partai mereka yang terbukti melakukan dukungan terhadap pemakzulan tersebut.

DPD Demokrat sendiri dalam perjalanannya kemudian melakukan penyelidikan terhadap keputusan yang diambil oleh Fraksi Demokrat dalam mengusung Pemakzulan terhadap Risma. Dalam perjalanannya, DPD yang kemudian juga berkonsultasi dengan DPP Demokrat memutuskan untuk tidak lagi meneruskan pemakzulan terhadap Risma dan akan memberikan sanksi kepada kader partai yang terbukti mendukung pemakzulan tersebut. Sikap yang diambil DPP dan DPD Demokrat ini, merupakan evaluasi partai terhadap kepengurusan partai tingkat II yang kemudian tidak sejalan dengan instruksi partai, bahwa partai akan selalu mendukung kinerja pemerintah di daerah manapun, serta dengan kepemimpinan siapapun, meskipun bukan berasal dari Demokrat. Hal ini dikemukakan oleh Ketua DPD Demokrat Jatim yang kala itu dipegang oleh Ibnu Hajar di sejumlah media, “...*Demokrat tidak pernah memosisikan dirinya sebagai partai oposisi di semua tingkatan. Demokrat harus mendukung siapa pun yang menjadi kepala daerah...*”.

Lebih lanjut, Eddie juga menceritakan, bahwa sampai-sampai ketua DPRD, yakni Wisnu Wardhana dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPC Demokrat Surabaya. Tak hanya itu, aktor tersebut (WW), juga tak luput dari ancaman PAW atau recall oleh partai. Berikut kutipan wawancara dengan informan, “...*semuanya mundur bahkan ketua Dewan dicopot dari jabatannya ketua DPC Demokrat, bahkan kemaren itu rencananya mau ditarik (recall) dari sini...*”.

Dalam kesempatan lain, informan yang terdapat dalam penelitian ini yang salah satunya berasal dari PKB, Masduki Toha menuturkan bahwa konstelasi pemakzulan walikota yang sebelumnya telah kuat memang harus berubah karena terdapat perbedaan sikap dari partai yang memiliki tingkatan di atas kepengurusan partai tingkat II. Hal ini terjadi salah satu faktornya dikarenakan walikota sendiri kemudian meminta perlindungan kepada berbagai pihak. Apa yang dijelaskan tersebut sesuai sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Masduki dalam kutipan wawancara berikut:

“...konstelasi politik sebenarnya waktu itu bagus, dari sini tingkat sini udah bagus, dari 7 fraksi ada 6 fraksi yang mendukung, tapi kenyataannya partai itu berbeda-beda, sikap partai yang di atas, ada DPW, DPP berbeda-beda akhirnya dengan sendirinya ketakutan juga, akhirnya disini yang dibawah konstelasinya berubah juga, karena walikota minta perlindungan dari Demokrat, PDIP, Golkar, PKB, perlindungan ke macam2 akhirnya ini lah yang terjadi konstelasi berubah, akhirnya dicabut sendiri dengan pimpinan dengan rapat yang tidak karu2an, itu lah.. karena konstelasi politik berubah, gagal (pemakzulan)...”

Sebagai kader partai, Masduki sendiri juga tak luput dari penyelidikan yang dilakukan oleh DPW mengingat fraksi PKB dalam hal ini sebelumnya mendukung akan adanya pemakzulan terhadap walikota tersebut. “...*saya tetep, karena sekali lagi apa yang saya lakukan*

dengan partai, maka kami harus mempertanggungjawabkan kepada partai, 5 orang anggota PKB ditanya juga di DPW...”, kutipan wawancara yang dikemukakan oleh anggota fraksi PKB DPRD Surabaya tersebut.

Eddie Prabowo juga menceritakan banyak hal, setelah sebelumnya menceritakan tentang kondisi yang ada di Demokrat, kini Eddie juga sedikit membeberkan kondisi yang ada di PDI-P. Eddie sendiri, dalam beberapa penjelasan sebelumnya mengemukakan bahwa, Wisnu Sakti Buana memiliki kepentingan tertentu yang disinyalir hendak menggantikan posisi Risma sebagai walikota Surabaya, namun, hal ini kemudian berubah ketika konstelasi yang ada dalam internal PDI-P sendiri tidak memungkinkan hal tersebut terjadi. Konstelasi tersebut, yakni DPP PDI-P sendiri memiliki konflik kepentingan terhadap DPC PDI-P yang saat ini dipegang oleh WS. Ditambahkan pula, bahkan konstelasi yang ada hampir membuat WS sendiri kemudian di nonaktifkan dari jabatannya sebagai ketua DPC PDI-P Surabaya, namun, Bambang D.H kemudian memback-up WS yang notabene merupakan anak kandung dari politis senior PDI-P yakni pak Tjip. Keterangan tersebut diperoleh penulis, sebagaimana kutipan wawancara yang dilakukan berikut:

“...nah kalo pertanyaannya seperti itu jawabnya satu kalau dari PDI-P, ini kan politik yang berkuasa sekarang itu dsini ketua DPC PDI-P (Wisnu Sakti Buana) sekarang ini itu kan anaknya pak Tjip. Sedangkan Pak Tjip itu barangkali pada saat beliau menjadi sekjen di DPP PDI-P onok sing gak seneng, ini tercium.. pak wisnu ini berambisi menggantikan ibu risma sebagai walikota sedangkan kelompok penguasanya sekarang bukan kelompoknya pak Tjip, jadi sangat tidak mendukung sehingga pada waktu itu hampir wisnu sakti buana akan diganti oleh DPP nya. Hanya si Bambang DH. yang pasang badan karena dia kan temen baik baged sama pak Tjip itu, “dan kalo sampe wisnu itu diberi sanksi saya akan mundur jadi wakil walikota”, itu jaminannya dia. Kalo pun betul dia akhirnya mundur PDI-P rugi karena kan tidakn ada kepala daerahnya, dan bambang DH ini kan masih baik di mata partai sehingga bargain itu dituruti...”

Dalam instansi yang berbeda, Soekarwo sebagai Gubernur Jawa timur juga tidak tinggal diam dalam konflik ini. Soekarwo yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat kemudian menerbitkan SK Nomor 131/2059/011/2011 yang dikirimkan kepada DPRD untuk membatalkan pemberhentian walikota Surabaya. Hal ini menjadi semakin mearik lantaran posisi kekuatanyang sebelumnya mendukung pemakzulan terhadap Risma kini semakin lemah. Bagi Masduki, SK yang dikeluarkan oleh Gubernur merupakan hak represif yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi kepada DPRD tingkat II. Namun, lebih lanjut, masduki sendiri mengemukakan bahwa dia tidak tahu alasan kenapa kemudian Gubernur melakukan hal tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh di sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“...kalo itu sudah ranah berbeda lagi, gubernur itu adalah.. seluruh peraturan perda apapun yang dibuat oleh DPRD tingkat II , itu harus ada hak represif gubernur, hak nya gubernur untuk melakukan seperti itu, apa alasannya kita tidak tahu, tapi saya terus terang saya tidak ketemu gubernur, coba pada waktu itu kita ketemu dan kontelasi nya tidak berubah, beda lagi ceritanya. Karena gubernur taunya dari koran2 aja..”

Berbeda dengan Masduki, Eddie memiliki pandangan tersendiri kenapa kemudian Gubernur menerbitkan surat tersebut. Baginya apa yang dilakuakn oleh Gubernur tersebut merupakan upaya guna mengantisipasi “*efek domino*” yang akan ditimbulkan jika kemudian pemakzulan tersebut terjadi. Dalam kaitan dengan permasalahan ini, penulis akan banyak membahasnya dalam sub-bab selanjutnya.

Diar sendiri selaku pengusaha juga tidak banyak berkomentar mengenai konstelasi yang berubah 180% ini. Menurutnya, faktor yang sangat politislah yang kemudian menyebabkan keadaan yang ada kemudian berubah 180%. Ia sedikit berkomentar bahwa terdapt tekanan politik yang berasal dari partai pusat untuk kemudian menghentikan keputusan DPRD sebelumnya. Hal ini ia kemukakan sebagaimana berikut:

“...kalo itu kami para pengusaha melihatnya sangat politis keputusan DPRD yang berbalik arah, faktor politis yang sangat kuat. Ya memang dalam hal ini DPRD harus menimbang, kepentingan siapa yang lebih diuntungkan, kepentingan2 masyarakat yang lebih luas yang harus diuntungkan dalam kebijakan itu. Kalo awalnya mereka menentang kebijakan walikota terus tiba2 berbalik mendukung itu saya pikir faktor politis, karena mungkin tekanan politik dari partai pusat. Karena kita semua tau sendiri ya, pada saat itu ketua DPRD menentang kebijakan walikota yang pada akhirnya ketua DPRD dikeluarkan dari partainya, ini faktor yang sangat politis...”

Sedangkan Subagyo sendiri yang merupakan kalangan Pemkot memiliki pandangan terkait SK Gubernur tersebut serta pandangannya tentang konstelasi politik yang kemudian berubah 180 derajat tersebut. Sikap DPP Demokrat yang kemudian memberhentikan Wisnu Wardhana sebagai ketua DPC Demokrat, ia rasa telah menunjukkan bahwa yang diambil oleh DPC merupakan keputusan yang keliru. Ia menambahkan, SK Gubernur yang dikirimkan kepada DPRD Surabaya tentang pemberhentian usulan pemakzulan terhadap walikota Surabaya lantaran pemerintahannya Tri Risma sendiri masih belum memiliki kesempatan lebih untuk menunjukkan *performance* nya mengingat pemakzulan tersebut dimunculkan belum samapi 1 tahun pemerintahan Risma. Hal tersebut, dikemukakan oleh Subagyo sebagaimana berikut:

“...saya nggak tahu, tapi itu bukan itu tok kan, partai demokrat memberhentikan wisnu wardana sebagai ketua DPC Demokrat, artinya DPP Demokrat tidak setuju dengan upaya pemakzulan itu, terus Gubernur Soekarwo menerbitkan surat seperti itu, saya kira ya karna ini baru tahun pertama belum sampe setengah setahun, ya kita lihat lah performances risma seperti apa, saya kira kalo gubernur soekarwo lebih banyak melihat pada performances, itu blum bisa terukur karena belum setahun masih separo jalan, kalo kemudian sk DPP

Demokrat memberhentikan wisnu itu soal sanksi indisipliner terhadap kebijakan partai, kalo menurut saya seperti itu...”

Dalam kesempatan yang berbeda, Emanuel Sujatmiko berbicara panjang lebar mengenai manuver politik yang kemudian berubah 180 derajat ini. Terkait konstelasi tersebut, Emanuel mengemukakan bahwa upaya pemakzulan tersebut pada dasarnya memang tidak benar. Apa yang dilakukan oleh sebagian besar anggota DPRD tersebut malah menunjukkan hal yang kontra produktif bagi partai, mengingat masyarakat Surabaya sendiri memilih untuk mendukung apa yang kemudian menjadi kebijakan Tri Rismaharini. Hal tersebut sebagaimana ia kemukakan berikut:

“...ya Alhamdulillah lah, pimpinan2 partai itu akhirnya sadar bahwa sebenarnya itu gak bener, yang dilakukan oleh anak buahnya di DPRD surabaya itu gak bener, lebih didasari dengan kepentingan2 yang sempit, tidak strategis yang akhirnya kemudian ada upaya untuk memberikan instruksi untuk memberhentikan itu...”

“...karena sebetulnya partai2 itu melihat apa yang dilakukan oleh anggotanya di DPRD itu kontra – produktif bagi partai, jadi justru itu yang akan melemahkan partai, karena memang sebagian besar masyarakat justru mendukung apa yang dilakukan oleh risma dalam penataan reklame karena memang reklame yang besar itu dibatasi karena melihat bahaya jadi ada beberapa kejadian reklame besar itu roboh menimbulkan korban, pemberangkatan kereta api tertunda, nah ini kan berkaitan dengan persoalan-persoalan kepentingan-kepentingan umum semua dan ini lah yang akan ditata tapi rupanya para anggota DPRD melihat lain, bukan melihat ini sebagai penataan dalam rangka kepentingan umum, tapi saya juga tidak tahu apa yg dilihat oleh anggota DPRD tapi justru pada sikap-sikap politik...”

Sedikit berbicara politik, Emanuel berpendapat bahwa apa yang terjadi, menunjukkan hal yang memalukan. Menurutnya, kejadian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara partai dengan kader tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di lain sisi, hal ini dapat juga dilihat bahwa partai kemudian tidak mampu mengontrol kadernya yang kemudian bertindak tidak sesuai dengan kepentingan partai. Berikut kutipan wawancara yang mengemukakan hal tersebut, “...ya sebetulnya kalau saya melihat itu sesuatu yang sangat memalukan dari sisi politik. Ini terlihat bahwa antara partai dan kader nya tidak terkoordinasi dengan baik, ini membuktikan bahwa kader dalam partai atau partai tersebut tidak dapat mengontrol kadernya...”

Apa yang dikemukakan oleh Emanuel diatas, bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, sebelumnya ia telah menjelaskan kepada para pengusung keputusan pemakzulan tersebut. Bahwa pemakzulan sendiri merupakan mekanisme yang tidak serta merta diputuskan secara sepihak oleh DPRD Surabaya. Hal ini sebagaimana dikemukakan berikut:

“...pemakzulan itu tidak jadi, sebetulnya waktu itu sudah saya ingatkan bahwa kalo hanya berangkat dari kebijakan menata reklame dalam rangka pemakzulan itu tidak cukup karena

tidak ada peraturan yang dilanggar dan hukum yang dilanggar. dan Kalo peraturan walikota itu mau ditiadakan ada jalur lewat gubernur apa lewat MA, jadi DPRD sendiri tidak bisa meniadakan keputusan itu. Ya kalo DPRD sebagai alat menekan karena politik itu kan sebagai kekuatan² untuk menekan kebijakan yaitu persoalan lain dan kalo saya katakan justru itu hal yang tidak elok jika dilihat oleh masyarakat. Akan lebih elok jika itu melalui jalur gubernur / MA, sehingga akan kelihatan tidak terlihat suatu konflik antara “ibu dan bapak” dalam menyelenggarakan Rumah Tangga daerah itu...”

Di lain sisi, pemakzulan hanya akan bisa terjadi jika memang terdapat pemimpin eksekutif yang melakukan tindakan melanggar hukum pidana. Baginya, argumentasi yang dibawa oleh sebagian besar kalangan DPRD bahwa Risma melakukan tindakan yang melanggar hukum, merupakan argumentasi prematur jika kemudian digunakan untuk menjatuhkan/memakzulkan Risma. Baginya, apa yang dilakukan Risma bukanlah tidak memiliki unsur kejahatan dan tindak pidana, hal ini lah yang menurutnya akan membuat malu partai politik. Lebih jauh dalam kutipan wawancara berikut, Emanuel berbicara banyak mengenai hal ini:

“...kalo berbicara pemakzulan, kepala daerah itu hanya bisa dimakzulkan kalo dia melakukan kejahatan bukan hanya melanggar hukum tapi melanggar hukum dengan berbuat kejahatan, karena melanggar hukum belum tentu kejahatan dan tindak pidana. Nah yang terjadi pada Risma tidak ada kejahatan nya maupun tindak pidana sehingga tidak dapat dilakukan pemakzulan, kalo itu diteruskan ini akan membuat malu partai politik, berarti ini yang bodoh partai politiknya atau kader² partai politiknya? Nah ituuu sudah saya beri tahu kalo harus ada kejahatan dan tindak pidana harus jelas dan harus diputuskan di pengadilan jadi tidak cukup untuk dilakukan pemakzulan, kalo melanggar hukum dari aspek administrasi bukan menjadi persoalan, banyak karena kemungkinan bisa juga, karena dalam menyelenggarakan pemerintahan aspek hukum yang dilanggar itu ada maka warga Negara itu bs menggugat sebagai contoh kalau anda dilanggar hak anda oleh undang², siapa yang membuat undang² adalah presiden dan DPR, anda bisa mengajukan bahwa UU itu dibatalkan oleh MK, kalo itu dibatalkan oleh MK berarti presiden dan DPR ini kan melanggar hukum toh, terus apakah hal itu bs jadi penyebab pemakzulan prseiden?, Tidak. naaahh jadi harus hukum pidana, dalam kasus Risma juga begitu tidak ada pidana nya.. haha saya tidak tahu siapa yang bodoh...”

Konflik Legislatif vs Eksekutif Surabaya disini menjadi menarik, lantaran apa yang diperlihatkan kepada publik layaknya drama yang setiap detik adengan yang dimainkan oleh setiap aktornya selalu berubah. Konstelasi politik yang kemudian berubah menjadi 180% menguntungkan posisi Walikota ini disinyalir merupakan manuver guna mengamankan kepentingan yang lebih besar dari pada sekedar posisi walikota Surabaya. Daris inilah penulis kemudian membahas sedikit banyak dalam sub-bab selanjutnya, terkait kepentingan apa yang kemudian membuat partai politik yang ada melakukan manuver 180% sehingga pemakzulan pun gagal.

Kostelasi Nasional, *Efek Domino* (jika) Pemakzulan Walikota terjadi.

Partai Golkar merupakan satu-satunya partai yang tetap berada pada jalur pemakzulan tanpa berubah mulai dari awal hingga khir, meski rekan-rekannya dari partai lain yang sebelumnya mendukung kemudian menarik dukungannya. Eddie Budi Prabowo yang sebelumnya juga mengemukakan bahwa partai nya tetap konsisten dengan jalur pemakzulan terhadap walikota Surabaya membeberkan beberapa alasan kenapa kemudian manuver-manuver politik yang dilakukan oleh elite-elite partai menjadi berubah 180%.

Secara makro, kekuatan yang ada di Indoensia saat ini sedang dikuasai oleh Demokrat, baik ditingkatan Eksekutif nasional maupun Legislatif Nasional dan tentu saja kekuatan legislatif tingkat II Surabaya. Dalam pandangannya, berubahnya sikap politik yang ditunjukkan oleh Demokrat sebagai kekuatan yang hampir menguasai lembaga-lembaga pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif di berbagai daerah, merupakan antisipasi supaya dampak yang ditimbulkan dari pemakzulan terhadap walikota surabaya tidak merembet ke daerah lain dan tentu saja supaya tak merembet pada kursi RI 1. Baginya jika kemudian pemakzulan terjadi, maka *efek domino* yang ia sebutkan, mungkin saja terjadi. Hal ini ia kemukakan dalam kutipan wawancara berikut:

“...andaikan waktu itu ini dalam rekaan politik, mungkin kalo pemerintah pusat tidak ketakutan, bisa jebol.. artinya begini, kalo seandainya disini ini bisa terjadi yang namanya Risma itu turun apa tidak merantak ke seluruh indonesia?, yang kedua apa tidak merantak ke tingkatan yang lebih tinggi? Sampai presiden pun akan dimakzulkan, karena menganggap ketika surabaya bisa kenapa daerah lain tidak nisa bahkan nasional.. nah ini lah akhirnya pagi2 mendagri sudah memberi isyarat gak bisa dengan alesan seperti itu risma dimakzulkan karena mereka khawatir merembet. Efek domino.. baik ke tingkat II yang lain, provinsi yang lain, sampe ke RI 1 pun bisa terjadi...”

Ia berpendapat pula, bahwa latar belakang kenapa kemudian Gubernur Jatim, Soekarwo, mengirimkan surat keputusan kepada DPRD Surabaya untuk memberhentikan pemakzulan terhadap walikota Risma, merupakan salah satu upaya guna mengantisipasi efek domino tersebut. Berikut pernyataannya:

“...itu tadi, menurut saya karena efek domino mungkin bisa2 dia juga bisa kena nanti, dia melakukan kesalahan dikit 100 orang bersatu ya bisa terjadi, yang paling parah waktu itu ya RI 1 paling kuatir, makanya pagi2 mendagri mengatakan begitu, begitu mendagri mengeluarkan seperti itu pasti gubernur ya iyaa dengan perintah dari pemerintah pusat...”

Hal inilah yang kemudian melatar belakangi sikap DPP dan DPD Demokrat yang bahkan mengambil tindakan tindakan tegas dengan memberikan sangsi kepada anggota legislatif dari partai tersebut, dan bahkan, WW yang sebelumnya merupakan ketua DPC Demokrat,

kemudian dicopot dari jabatannya dan diancam akan di PAW kan. “...yang soal WW itu DPP nya sangat keberatan, kalo sampai terjadi efek domino kenanya ke RI 1...”, ungkap Eddie dalam kutipan wawancara dengan penulis.

Secara umum, Eddie sendiri melihat bahwa dinamika yang dipertunjukkan dalam panggung politik Surabaya merupakan suatu hal yang wajar. Baginya, partai nya tidak memiliki kepentingan apapun dalam pemakzulan tersebut. Lebih jauh, ia mengemukakan efek domino yang akan terjadi jika pemakzulan tersebut benar-benar terwujud tidak akan berpengaruh kepada partainya. Ia mengemukakan bahwa akan berbeda jika kemudian R1 yang ada merupakan orang yang berasal dari partai mereka, karena tidak mungkin partainya akan melakukan tindakan ekstrem tersebut. Hal tersebut ia kemukakan sebagaimana berikut:

“...kita melihat itu itu sebagai suatu hal biasa ya itu dinamika politik, patokan nya untuk kepentingan masyarakat banyak kita tetap berjuang terus walaupun yang lain mundur selama itu untuk rakyat, saya tidak punya kepentingan soalnya, artinya efek domino yang terjadi tidak akan berpengaruh kepada kita (golkar), lebih2 untuk RI 1 kan bukan temen kita. Mungkin kalo RI 1 nya dari golkar mungkin kita masih berpikir ulang waktu itu. Kita tidak langsung ekstreem harus ganti mungkin dengan cara2 yang lain untuk menjaga kepentingan partai kami juga...”

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil berbagai temuan serta analisis data dalam penulisan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

- 1) Dalam Konflik Pemakzulan Walikota Surabaya terdapat beberapa elite yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam konstelasi politik tersebut, dari temuan data diatas elite-elite tersebut diantaranya:
 - a) Ketua DPRD Demokrat Surabaya serta DPC Demokrat Surabaya yakni, Wishnu Wardhana. Hal ini terungkap sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa informan dalam penelitian ini. Tak hanya itu kengototan elite tersebut sangat menunjukkan bahwa WW memiliki kepentingan dalam konflik tersebut.
 - b) Wisnu Sakti Buana yang merupakan ketua DPC PDI-P Surabaya. WS sendiri menjadi aktor penentu sebagaimana dikemukakan oleh Keller dan berperan penting dalam perubahan sikap PDI-P Surabaya yang kemudian mendukung pemakzulan terhadap Risma. Selain itu, WS disinyalir memiliki kepentingan lain,

dimana jika Risma kemudian lengser, maka dirinya kemudian dapat maju sebagai pengganti pimpinan surabaya, bisa jadi dalam jabatan walikota maupun wakil walikota.

- c) Beberapa elit DPRD Surabaya. Hal ini terkait dukungan yang cukup besar dari semua anggota DPRD Surabaya, minus elit yang berasal dari PKS, dalam mendukung pemakzulan. Selain itu, ditemukannya data yang menunjukkan akan adanya keterkaitan elit legislatif Surabaya dengan pengusaha, dan bahkan adanya kalangan elit yang juga merupakan kalangan pengusaha dari dunia Reklame, seperti Eddie, menunjukkan bahwa elite-elite tersebut memiliki kepentingan politik maupun ekonomi.
 - d) Kalangan Pengusaha. Sebagaimana dikemukakan oleh informan yang berasal dari kalangan dunia usaha, bahwa terdapat relasi antar mereka dengan dunia usaha, bahkan hal telah menjadi sebuah kebutuhan setidaknya bagi kalangan dunia usaha untuk melancarkan usaha mereka.
 - e) Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, sebagai elit yang mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif reklame yakni perwali 56 dan 57 yang kemudian di revisi menjadi perwali 70 dan 71.
 - f) Gubernur Surabaya, Soekarwo. Soekarwo mengeluarkan SK Gubernur No. 131/2059/011/2011 tentang pemberhentian pemakzulan terhadap walikota. Hal ini dilakukan oleh Soekarwo karena dia merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat melalui mendagri yang menginstruksikan bahwa pemakzulan tidak bisa dilakukan karena tidak memiliki alasan yang kuat. Jauh dari pada itu, hal ini merupakan upaya untuk menghindari dampak dari pemakzulan yang nantinya malah dapat membahayakan partai Demokrat.
- 2) Faktor-faktor yang menyebabkan berubahnya sikap - sikap elite politik dan partai politik yang sebelumnya mendukung wacana pemakzulan sehingga kemudian menarik dukungan tersebut antara lain:
- a) Dari kalangan elite dan partai Demokrat, alasan utama partai mengeluarkan kebijakan menarik dukungan terhadap wacana pemakzulan dan bahkan memberikan sanksi terhadap anggota yang terbukti mendukung wacana pemakzulan tersebut, dikarenakan adanya upaya untuk menghindari dampak yang

lebih besar ketika pemakzulan terjadi di Surabaya. Demokrat sebagaimana dikemukakan salah satu informan dalam penelitian ini tidak ingin pemakzulan pada akhirnya menimbulkan *efek domino* terhadap daerah-daerah lain dan tak menutup kemungkinan merembet kepada RI 1 yang merupakan elite dari kader partai tersebut. Meskipun dalam beberapa kesempatan elite demokrat mengemukakan bahwa kebijakan partai yang mendukung semua pemerintahan daerah, meskipun pimpinan pemerintahannya bukan berasal dari Demokrat, menjadi alasan normatif yang dilakukan oleh Demokrat.

- b) Komunikasi Politik yang dilakukan oleh Risma kepada beberapa elite-elite partai. Komunikasi kepada Gubernur Jatim Soekarwo dan komunikasi politik kepada pimpinan partai PDI-P Pusat, menjadi salah satu faktor kenapa kemudian konstelasi konflik di Surabaya kemudian berubah 180%.
- c) Faktor yang menentukan dari kalangan elite dan partai PDI-P lebih disebabkan karena adanya komunikasi politik yang dilakukan Risma. Tak hanya itu, faktor lainnya yakni adanya upaya untuk mencegah salah satu elit di PDI-P yang memiliki tujuan untuk melengserkan Risma dan kemudian menggantikan posisi yang lowong tersebut.
- d) Sedangkan faktor yang membuat partai-partai lain menarik dukungan pemakzulan, selain Golkar yang masih kekeh dengan pemakzulan, yakni karena mundurnya kekuatan paling besar di dalam DPRD Surabaya, Demokrat, serta adanya kontrak politik yang dilakukan oleh beberapa partai tersebut dengan Demokrat sebagaimana kontrak politik mereka di level Nasional.
- e) Keluarnya SK Gubernur 131/2059/011/2011 yang dikirimkan oleh Gubernur Jawa Timur kepada DPRD untuk membatalkan pemberhentian walikota Surabaya. Dalam temuan data yang dideskripsikan penulis dalam BAB III menunjukkan bahwa Mendagri kemudian menghubungi Gubernur secara langsung bahwa pemakzulan tidak memiliki alasan hukum yang kuat, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Keluarnya SK ini sebenarnya bagian dari upaya partai penguasa agar menghindari dampak yang lebih besar dari pemakzulan tersebut. Hal ini beralasan mengingat pemerintahan pusat dan provinsi Jawa Timur merupakan kekuatan politik yang memiliki “bendera” yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Zuhro, Siti R. 2009. *Demokrasi lokal : peran aktor dalam demokratisasi*. Penerbit Ombak. Yogyakarta
- Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Duverger, Maurice. 1981. *Sosiologi Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soimin. *Impeachment Presiden & Wakil Presiden Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sapuan. 2010. *Impeachment Presiden*. Yogyakarta: Hexagon.
- Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haryanto. *Kekuasaan Elit; Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: PLOD-JIP Fisipol UGM.
- Craib, Ian. 1984. *Teori Sosial Modern : dari Parson sampai Habermas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritzer, George. 1980. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritzer, George dan Douglas Goodman J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Perss.
- Varma, S. P. 2007. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haryanto. 1991. *Elit, Massa, dan Konflik: suatu bahasan awal*. Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM.
- Rauf, Marswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Cetakan keenam. Jakarta.
- Dahrendorf, Ralf. *Essays in the Theory of Society*. 1968. Stanford. California. Stanford University Press.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo. Jakarta.

- Wahyudi, Isa, Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*. Setara press. Malang.
- Budiharjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press.
- Robbins, Stephen P. Diterjemahkan oleh Tim Index. 2006. *Perilaku Organisasi*, jilid II, Edisi 10. Jakarta Gramedia.
- Pruitt, Dean G. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar. 2009. Yogyakarta. Halaman 9.
- Rauf, Marswadi. *Konsensus dan Konflik Politik*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Halaman 9.
- M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 54
- Mattew B.Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI-Perss, Jakarta, 1992, Hal. 16-20.
- Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press. halaman 94
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers: Jakarta, 1980, hlm. 27.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Poloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *TEORI SOSIOLOGI. Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sunarto, Kamanto. 1993. *Pengantar Sosiologi Edisi Kedua*. Jakarta: LP-FE UI.
- Raho, SVD Bernard. 2007. *Teori sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka publisher.
- Dwi Susilo, Rachmad K. 2008. *20 Tokoh Sosiologi Modern*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007. hlm. 54
- Fred. Schwarz, 1960. *You Can Trust the Communists*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs. page. 71

Tom Bottomore, dkk. 1979. Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy. Victoria: Penguin Books. page. 34

Lewis Coser (ed), 1965. George Simmel. Eaglewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. page. 56-65

Lewis Coser, 1956. The Function of Social Conflict. New York: Free Press. page. 151-210

Margaret. M. Poloma, 1994. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 113-120

Lewis Coser, 1967. Continuities in the Study of Social Conflict. New York: Free Press. page. 32-70

Ralf Dahrendorf, 1959. Class and Class Conflict in Industrial Society, Calif.: Stanford University Press. page. 142-189

Jurnal :

Seger W. *Sekilas tentang Pemakzulan (Impeachment)*.

Internet :

<http://biarhappy.wordpress.com/2011/04/11/teori-elite-politik/>, diakses pada 26/10/2011, pukul 12:01 wib.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> diakses pada 19/10/2011, pukul 20:54 wib.

<http://www.kamusbahasaIndonesia.org/makzul> diakses pada 19/9/2011, pukul 21:34 wib.

<http://theresiahestik.wordpress.com/2010/03/08/teori-konflik/> diakses pada 27/10/2011, pukul 13:01 wib.

www.kamusbahasaIndonesia.org/makzul diakses pada 19/9/2011, pukul 21:50 wib.

<http://www.butonutara.blogspot.com/2011/07/konflik-sosial.html> diakses pada 26/10/2011, pukul 15:01 wib.

www.kamusbahasaIndonesia.org/makzul diakses pada 19/9/2011, pukul 22:34 wib.

Empat Tahap Resolusi Konflik, dalam Tempo Interaktif yang diakses dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs.20040617-04.id.html> pada tanggal 20/12/2011 pada pukul 03.19 wib

Prijosaksono dan Sembel, 2002, dikutip dari http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_6_KONFLIK_SOSIAL pada tanggal 12/9/2011 pada pukul 03.19 wib